**THESIS**

# ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

**Oleh :**

**Ghina Aprilia**
**NIM. E2071231022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

**THESIS**

# ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

**Untuk Memenuhi Persyaratan**
**Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**
**Kajian Kebijakan Publik**

**Oleh:**
**Ghina Aprilia**
**NIM. E2071231022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

# ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

**Oleh** :

**GHINA APRILIA**
**NIM. E2071231022**

**Disetujui Oleh :**

Ketua

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si Tanggal : ……
NIP. 196209291989032001

Sekretaris

Dr. Ira Patriani, M.Si Tanggal : .....
NIP. 197611302003122001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP**

**Oleh** :

**GHINA APRILIA**
**NIM. E2071231022**

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : 27 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang 01

**Tim Penguji**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si | Dr. Ira Patriani, M.Si |
| NIP. 196209291989032001 | NIP. 197611302003122001 |
| Penguji Utama | Penguji Pendamping |
| Dr. Rusdiono, M.Si | Dr.Herlan, M.Si |
| NIP. 196403171988101001 | NIP. 197205212006041001 |

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr.Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

## ABSTRAK

Kecamatan Sungai Kakap memiliki potensi perikanan yang signifikan yang mendukung aktivitas ekspor produk perikanan. Namun, tantangan dalam koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam ekspor produk perikanan di Kecamatan Sungai Kakap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, komitmen bersama, serta mekanisme resolusi konflik yang terstruktur menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan ekspor. Selain itu, ditemukan pula adanya tantangan, dalam hal membangun kepercayaan dan komitmen kerja sama dalam proses ekspor Produk Perikanan. Kesimpulannya, *collaborative governance* memiliki potensi besar dalam mengatasi tantangan ekspor produk perikanan di Kecamatan Sungai Kakap. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sungai Kakap.



***Keywords : Collaborative Governance,*** **Aktivitas Ekspor, Produk Perikanan**

## ABSTRACT

Sungai Kakap sub-district has significant fisheries potential that supports export activities of fishery products. However, challenges in coordination and synergy among stakeholders are often an obstacles in the development of this sector. This research aims to analyze the application of collaborative governance in the export of fishery products in Sungai Kakap District. The research method used is descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews interviews, field observations, and document studies. The results showed that the success of collaborative governance depends on the active involvement of local government, business actors, fishermen, and other related parties. Factors such as effective communication, mutual commitment, and structured conflict resolution mechanisms are elements of collaborative governance. conflict resolution mechanisms are important elements in improving export efficiency and sustainability. increasing export efficiency and sustainability. In addition, it was also found that challenges, in terms of building trust and commitment to cooperation in the Fishery Product export process. In conclusion, collaborative governance has great potential in overcoming the challenges of exporting fishery products in the Sungai Kakap sub-district. The recommendations of this research include increasing the capacity of stakeholders and strengthening cross-sectoral collaboration to encourage economic growth in the economic growth in Sungai Kakap Sub-district.



**Keywords: Collaborative Governance, Export Activity, Fishery Products**

## RINGKASAN THESIS

Thesis ini berjudul "Analisis *Collaborative Governance* dalam Ekspor Produk perikanan di Kecamatan Sungai Kakap" Adapun yang penulis bahas dalam thesis ini yaitu menganalisis peran BPPMHKP, PT Pulau Mas Kahtulistiwa, dan nelayan pemilik kapal dalam konteks *Collaborative Governance* untuk mendukung ekspor produk perikanan di Kecamatan Sungai Kakap. Dengan menggunakan teori Ansel dan Gash, penelitian ini menyoroti kolaborasi antaraktor sebagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola ekspor perikanan. Ditemukan beberapa fenomena permasalahan seperti, Kelembagaan yang Kurang Efisien dalam Mendukung Kolaborasi Penerapan *Good Handling Certificate* (CPIB) menjadi salah satu masalah utama yang teridentifikasi. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak nelayan kesulitan memenuhi standar CPIB akibat kurangnya pelatihan dan fasilitas pendukung. BPPMHKP, sebagai pengawas mutu produk, sering menghadapi kendala dalam memastikan semua pihak memahami pentingnya sertifikasi ini. Menurut teori Ansel dan Gash, keberhasilan *Collaborative Governance* sangat bergantung pada kondisi awal yang mendukung. Dalam kasus ini, kelemahan dalam kelembagaan menunjukkan perlunya pembenahan untuk menciptakan landasan kolaborasi yang kuat.

Kompleksitas Regulasi Penangkapan Produk Perikanan yang Tidak Jelas juga menjadi tantangan signifikan. Nelayan di Sungai Kakap sering kali bingung dengan regulasi yang tidak konsisten, seperti ketentuan lokasi penangkapan atau jenis alat tangkap yang diperbolehkan. Fenomena ini mempersulit proses

kolaborasi karena menimbulkan ketidakpastian di antara para aktor. aspek desain kelembagaan sangat penting untuk memberikan struktur yang jelas dan mengurangi konflik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih konsisten dan transparan untuk mendukung kerja sama. Ketergantungan pada Eksportir Besar dalam proses *Collaborative Governance* juga menjadi isu penting. PT Pulau Mas Kahtulistiwa memegang peran sentral sebagai eksportir utama, tetapi dominasi ini membuat nelayan dan mini plane kehilangan posisi tawar. Ketergantungan ini menciptakan ketimpangan kekuatan dalam kolaborasi, yang bertentangan dengan prinsip kepemimpinan fasilitatif dalam teori Ansel dan Gash selain itu tidak Adanya Dokumen Perjanjian antara Kapal Tangkap dan UPI mencerminkan kelemahan dalam proses kolaborasi. Fenomena ini menunjukkan kurangnya formalitas dalam kerja sama, sehingga sering terjadi ketidakpastian mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Dalam teori Ansel dan Gash, proses kolaborasi yang efektif membutuhkan dialog terbuka dan pembelajaran bersama untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan kerja sama. Penyusunan dokumen perjanjian yang jelas antara kapal tangkap dan UPI merupakan langkah penting untuk memperkuat proses kolaborasi. Dalam proses penelitian hingga pada hasil wawancara yang disampaikan pada bagian Hasil dan Pembahasan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPPMHKP, PT Pulau Mas Kahtulistiwa, dan nelayan pemilik kapal dalam mendukung ekspor produk perikanan di Kecamatan Sungai Kakap menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, kelembagaan yang kurang efisien menjadi penghalang dalam penerapan *Good Handling Certificate (CPIB)*, yang merupakan

standar penting dalam ekspor perikanan. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan fasilitas yang memadai, sehingga banyak nelayan belum mampu memenuhi standar tersebut. Kedua, kompleksitas regulasi penangkapan produk perikanan menciptakan ketidakpastian di tingkat pelaku usaha, terutama nelayan, yang sering kali menghadapi kebingungan terkait peraturan penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan. Ketiga, ketergantungan yang tinggi pada eksportir besar, seperti PT Pulau Mas Kahtulistiwa, membuat nelayan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) kehilangan posisi tawar yang setara, menciptakan ketimpangan dalam hubungan kolaboratif. Terakhir, ketiadaan dokumen perjanjian formal antara kapal tangkap dan UPI memicu ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab dan hak, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan dalam kolaborasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* dalam mendukung ekspor produk perikanan di Sungai Kakap memerlukan pembenahan signifikan pada aspek kelembagaan, regulasi, distribusi kekuasaan, dan formalitas kerja sama. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis prinsip-prinsip teori Ansel dan Gash, diharapkan kolaborasi ini dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak. Hasil ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan, dialog terbuka, dan pembelajaran bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Ghina Aprilia Nomor Induk |
| Mahasiswa | : E2071231022 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Publik |

Dengan Ini saya mcnyatakan bahwa Thesis ini mcrupakan hasil karya saya scndiri dan bclum pernah diejukan untuk memperoleh gelar Magsiter Ilmu Administrasi Publik disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Thesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Maret 2025
Yang membuat Pernyataan

Ghina Aprilia, S.A.P
NIM.E2071231022

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***" Altitude depands on your attitude "***

°°

**(Nilai memang penting tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya).**

### PERSEMBAHAN

**Karya diri ini, Saya persembahkan Kepada :**

1. Kedua Orang tua saya, Bapak H. Najarman dan Ibu Hj.Dayang Isniati, S.E, M.M. dan Kedua Saudara Laki-Laki saya Sagitarisman, S.I.P., dan Ir. Valery, S.Tr.T. serta Kaka Ipar Saya Shena Dwi Tamara. S. KEP. NS. CWCS. Dan keponakan saya Abyaz Alvaronizam yang selalu melangitkan doa-doa indah, memberikan dukungan yang terasa hangat, dan Rumah yang selalu menjadi tujuan untuk pulang.
2. Happy 2gether Groups and Groupz Uniqz specially for Emak, Bunda, Ibu dan Bapak saya yang sudah mengganggap saya seperti anaknya sendiri dengan penuh kehangatan cinta kasih, perhatian dan pengertian selama di perantauan.
3. My ABCDEFGHINA Groups Betaria Sonika Dika,S.Tr.IP, dan Jihan Sudoko,S.Tr.T yang selalu gercep dan bisa di andalkan dalam setiap waktu dan keadaan.
4. My Lovely Friends From Away "Calon Istri Solehah" Raihan Farhanan Athhiyah, S.IP., Triyana Nurhayati, S.Tr.Kes, Ilka Nurawaliyah, S.Pd.,Gr Meskipun kita terbatas oleh jarak namun doa dan semangatnya masih selalu

terasa hangat. Yang selalu menghibur dengan mengirimkan reels-reels receh setiap harinya.

5. KM 88 Squad, Yetty Yuniarty, S.I.P., Jimmy Yonatahan Elwaren, S.St.Pi dan Agus Dwi Riyanto,S.P. yang selalu menjadi teman bertukar pendapat, memecahkan masalah, dan menjadi pelengkap dari keterbatasan satu sama lain pada setiap keadaan dan setiap pembahasan.
6. My Friend Abyadh, A.Md. Kom. yang selalu mendengarkah keluh kesah selama penulisan Thesis ini.
7. My SAPmate Sri Milanda, S.A.P., Rita Ria Messy, S.A.P., DAN Siska Pratiwi,S.A.P. yang selalu mendukung dan mendoakan pengerjaan Thesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Magister IAP Reguler 2023 yang telah membantu memberikan inspirasi,sifat optimisme, semangat yang membara , dan kerja sama yang baik dalam Penyusunan Thesis ini.

Last but not least, Terima Kasih Kepada **diri saya** sendiri untuk segala kerja keras dan kepercayaan diri sehingga Thesis ini bisa selesai. Semoga setiap kata yang telah tertulis ini memiliki beribu arti dan manfaat bagi semua pembacanya (ო˙ᵕ˙ო)e.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Thesis yang berjudul **"ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP"** dapat diselesaikan dengan baik.

Tulisan ini adalah sebuah aktivitas berpikir. Supaya otak bekerja dan membiarkan jutaan sel dalam tubuh bereaksi. Menjalani proses berfikir terindah dalam beberapa bulan, seolah berenang di dalam pikiran sendiri. Sulaman kata yang banyak makna dan tidak akan pernah selesai. Hanya mencoba untuk melihat realitas. Menemukan kesadaran bahwa manusia sebagai subyek yang terus bergerak.

Thesis ini juga disusun sebagai bagian upaya saya untuk memenuhi syarat akademik dalam memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Dalam penyusunan Thesis ini, saya banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen penguji Kedua saya yang telah memberikan masukkan guna menyempurnakan Thesis ini.

2. Dr. Arifin, M.AB., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Magister Fisip Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Pardi, S.Sos, M.AB., Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing saya selama proses perkuliahan Magister FISIP Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si. selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dorongan moral selama proses penyususnan Thesis ini.
5. Dr. Ira Patriani, M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan berharga dan wawasan yang banyak memperkaya proposal Thesis saya.
6. Dr.Rusdiono, M.Si selaku Penguji Pertama saya yang telah memberikan Nasihat, Masukan, Bimbingan, Saran Selama proses penyusunan Thesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar beserta Staff Akademik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan Thesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Thesis ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, Semoga segala bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga Thesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan menjadi kontribusi nyata bagi Analisis *Collaborative Governance* dalam Ekspor Produk Perikanan di Kecamatan Sungai Kakap.

Pontianak, 22 Maret 2025

Ghina Aprilia, S.A.P
NIM.E2071231022

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
ABSTRAK ..... iii
RINGKASAN THESIS ..... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... ix
PERSEMBAHAN ..... ix
KATA PENGANTAR ..... xiii
DAFTAR ISI ..... xiv
DAFTAR TABEL ..... xv
DAFTAR GAMBAR ..... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ..... xvii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang Penelitian ..... 1
1.2 Identifikasi Masalah ..... 16
1.3 Fokus Penelitian ..... 16
1.4 Rumusan Masalah ..... 17
1.5 Tujuan Penelitian ..... 17
1.6 Manfaat Penelitian ..... 17
1.6.1 Manfaat Teoritis ..... 17
1.6.2 Manfaat Praktis ..... 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 19
2.1 Konsep Collaborative Governance ..... 20
2.2 Kriteria Keberhasilan Collaborative Governance ..... 24
2.3 Model Kolaborasi Ansell dan Gash ..... 28
2.4 Governance ..... 32
2.5 Good Handling Practices Pada Kapal Penangkap Ikan (CPIB) ..... 33
2.6 Perdagngan International ..... 46
2.7 Penelitian Relevan ..... 55
2.8 Kerangka Pikir Penelitian ..... 56

2.9 Pertanyaan Penelitian ..... 58
BAB III METODE PENELITIAN ..... 59
3.1 Jenis Penelitian ..... 59
3.2 Langkah-langkah Penelitian ..... 59
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 62
3.4 Subjek dan Objek Penelitian ..... 63
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 64
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data ..... 68
3.7 Teknik dan Oprasional Data ..... 69
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 71
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sungai Kakap ..... 71
4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap ..... 82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 86
5.1 Mengetahui dan Me-pngidentifikasi Kepentingan dan Pemangku Kepentingan ..... 86
5.2 Peranan Stakeholder dalam Proses Ekspor Produk Perikanan ..... 119
5.3 Hubungan Yang terjadi Antar Stakeholder danlam Kolaborasi ..... 123
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..... 135
6.1 KESIMPULAN ..... 135
6.2 SARAN ..... 137

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ekspor udang wilayah Kalimantan Barat 2024 ..... 8

Tabel 1.2 target ekspor udang yang diharapkan untuk Kalimantan Barat tahun 2024 ..... 10

Tabel 2.2 Unsur Peniliaian CPIB Pada setiap tahapan..... 36

Tabel 3.1. Informan yang akan di wawancara ..... 60

Tabel 3.2. Rencana Jadwal Penelitian ..... 62

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Sungai Kakap Menurut Umur Tahun 2024 .... 72

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Kakap Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... 76

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan, Jumlah Guru dan Murid di Desa Sungai Kakap Tahun 2024 ..... 77

Table 4.4. Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian ..... 79

Tabel 4.5. Penggunaan Laha di Desa Sungai Kakap Tahun 2024 ..... 81

Tabel 4.6. Produksi Perikanan Kecamatan Sungai Kakap, Tahun 2024 ..... 83

Table 4.8. Jenis dan Variasi harga Ikan di Desa Sungai Kakap ..... 84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Potensi Laut Indonesia ..... 1

Gambar 2.2 Aktivitas Pemilik Kapal dalam Pengumpulan Ikan..... 8

Gambar 2.2 Sertifikasi Cara Penangan Ikan Yang Baik di Atas Kapal.....40

Gambar 2.3 Good Handling Practice Certificate Pemilik Kapal di Sungai Kakap .....44

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian .....57

Gambar 5.1 sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).....90

Gambar 5.2 Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP ) .....91

Gambar 5.3 CPIB SUPPLIER .....92

Gambar 5.4 Kegiatan ekspor produk udang beku ke jepang.....93

Gambar 5.5 Penyuluhuan BPPMHKP kepada Nelayan di Sungai Kakap .....97

Gambar 5.6 Inspeksi yang di lakukan BPPMHKP kepada Para Nelayan di Sungai Kakap .....90

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA .....146
LAMPIRAN 2 PANDUAN OBSERVASI .....154
LAMPIRAN 3. FOTO-FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN.....156
LAMPIRAN 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....159
LAMPIRAN 5. SURAT TUGAS PENELITIAN.....160
LAMPIRAN 6. DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN .....162

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

**Gambar 1.1 Potensi Laut Indonesia**




Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan (2024)

Dikaruniai wilayah laut dengan luas lebih dari 3,25 juta km2 , Indonesia sejatinya memiliki potensi yang sangat besar dari laut, baik berupa komoditas hasil laut, energi, mineral, pariwisata, maupun jasa yang bergerak di bidang transportasi laut dan kegiatan maritim lainnya. Potensi komoditas hasil laut berupa ikan dan lainnya di tahun 2024 tercatat memiliki nilai produksi lebih dari 179,5 trilyun rupiah dengan volume produksi lebih dari 6,7 juta ton (PUSDATIN KKP, 2024). Sumberdaya laut yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat dengan luas laut terbesar tersebut sangat melimpah, dimana potensi perikanan laut Kalimantan Barat sebesar 1.035.230,00 ton/tahun dan potensi lestari yang dapat di

manfaatkan setiap tahunnya di perkirakan 828.180,00 ton/tahun. Sektor perikanan dan kelautan Kalimantan Barat merupakan sektor yang memiliki prospek yang cerah untuk di bangun menjadi suatu kekuatan ekonomi yang tangguh, strategis dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor ini sangat prospektif untuk di jadikan suatu pengembangan bisnis serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di propivinsi Kalimantan Barat, dimana diketahui umumnya produksi hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kakap masih di dominasi oleh kegiatan perikanan tangkap, karna bahan baku ikan masih di peroleh dari hasil tangkapan laut dengan jumlah tangkapan pada tahun 2024 mencapai 30.000 ton (DKP Provinsi Kalimantan Barat 2024). Hasil tangkapan tersebut umumnya didominasi oleh ikan pelagis dengan persentasi sekitar 70 % dari total hasil tangkapan laut, yang kemudian dari jumlah hasil tangkapan ikan Tongkol tersebut lebih didominasi oleh ikan Tongkol.

Penangkapan Jenis ikan ikan di Kecamatan Sungai Kakap umumnya lebih di dominasi oleh kapal pole and line sebagai kapal yang spesifikasinya ditujukan khusus untuk menangkap ketiga jenis ikan tersebut. Kapal pole and line merupakan jenis kapal yang beroperasi dengan menggunakan alat tangkap kail yang dilengkapi dengan joran sebagai pengganti main linenya. Kapal pole and line memiliki areal penangkapan yang agak jauh dari fishing base sehingga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana yang dikhusunya untuk dapat menjaga mutu hasil tangkapan agar tidak mengalami penurunan mutu. Ikan merupakan komuditas yang muda dan cepat membusuk, sehingga ikan memerlukan penanganan yang cepat dan cermat, dalam

upaya mempertahankan mutunya sejak ikan di angkat dari air.

Moeljanto (1992), berpendapat bahwa ikan dan perikanan lainnya merupakan bahan pangan yang muda mengalami pembusukanan (high perishable food) paska mortem, hal ini diakibatkan oleh temperatur yang tinggi pada daerah tropis seperti Indonesia mengakibatkan kemunduran mutu cepat terjadi hanya dalam hitungan waktu 8 jam setelah ikan di tangkap dan di daratkan, dan juga penyebab utama pembusukan adalah kegiatan mikro organisme yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri (bakteri dan enzim) dan faktor luar (kontaminasi dan oksidasi) yang dapat terjadi secara bersamaan. Saat ini sebagian besar produksi ikan di Indonesia dihasilkan oleh usaha perikanan rakyat berskala kecil yang masih terbatas baik fasilitas, teknologi digunakan di perairan Morotai, purse seine merupakan alat tangkap yang dominan. Sementara itu nelayan setempat, banyak yang melakukan penangkapan tanpa menggunakan persiapan peralatan dan bahan unluk menyimpan hasil tangkapan dengan baik.

Hal ini sering terjadi, baik pada nelayan yang rnelakukan penangkapan dengan one day fishing, maupun yang tidak. Menurut Yunizal dan Wibowo(199S), ternyata ikan yang ditangkap dengan kapal nelayan tanpa dilengkapi sarana penyimpanan yang baik, 20 - 30 % mengalami kerusakan sebelum ikan sampai ke darat. Kondisi seperti ini mengakibatkan hasil tangkapan ikan nelayan tidak optimal, Dengan tingkat kesegaran pasca panen ikan kurang baik, kerusakan atau kehilangan (losses) selama penanganan dan pengolahan tidak dapat dihindari.

Meskipun pendekatan *collaborative governance* semakin sering digunakan dalam studi kebijakan publik, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasinya dalam konteks lokal, khususnya dalam sektor ekspor produk perikanan di wilayah pesisir seperti Kecamatan Sungai Kakap. Banyak studi sebelumnya cenderung menyoroti keberhasilan kolaborasi dalam skala nasional atau melalui inisiatif pemerintah pusat, namun belum cukup banyak yang menggali secara mendalam bagaimana kelima elemen inti—yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dialog tatap muka, dan proses kolaboratif diimplementasikan dalam konteks daerah dengan kompleksitas sosial dan ekonomi tersendiri. Secara khusus, aspek **kondisi awal** sering diabaikan, padahal ketimpangan kekuasaan antar aktor lokal seperti nelayan tradisional, eksportir besar, dan pemerintah daerah dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi sejak awal. Selain itu, studi terdahulu jarang menelaah secara rinci **desain institusional** dan bagaimana aturan main formal maupun informal terbentuk dalam forum kolaboratif sektor perikanan. **Kepemimpinan fasilitatif**, yang dianggap krusial dalam membangun kepercayaan dan menjembatani konflik antar aktor, juga kerap tidak dijelaskan secara kontekstual. apakah berasal dari pemimpin formal pemerintahan, tokoh masyarakat, atau pihak ketiga seperti LSM. **Dialog tatap muka** sebagai ruang negosiasi dan pembentukan pemahaman bersama belum banyak dikaji dari sisi dinamika interaksi antar aktor lokal yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda. Terakhir, meskipun **proses kolaboratif** sering disebut dalam berbagai literatur, pemahaman mengenai bagaimana komitmen, kepercayaan, dan hasil antara dibentuk di lapangan masih

minim, khususnya dalam konteks perikanan ekspor yang melibatkan skema global supply chain. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada penerapan menyeluruh teori *collaborative governance* di sektor perikanan ekspor pada level lokal.

Pendinginan merupakan perlakuan yang paling umum dalam mempertahankan mutu hasil perikanan terutama dalam tahap penanganan. Dalam penanganan ikan segar di upayakan suhu tetap rendah mendekati 0°C. Penanganan ikan harus di lakukan secepat mungkin untuk menghindari kemunduran mutu ikan sehingga di butuhkan bahan dan media pendinginan yang sangat cepat dalam menurunkan suhu ikan pada pusat thermal ikan. Tingkat kesegaran ikan akan semakin cepat menurun atau ikan akan mudah menjadi busuk pada suhu tinggi dan sebaliknya pembusukanan dapat di hambat suhu rendah (Suparno et al, 1993).

Besarnya potensi komoditas tangkapan hasil laut baik secara volume dan nilai menunjukkan perlunya upaya sungguh-sungguh dari segenap pihak yang terlibat sejak hasil laut ditangkap, didaratkan, hingga diproses dalam bentuk produk pengolahan untuk mengetahui, dan berkomitmen menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Hal tersebut dilakukan untuk dapat mempertahankan mutu ikan lebih lama dan berimbas pada harga jual ikan dan produk olahannya dengan harga yang baik. Komoditas hasil tangkapan laut seperti ikan mengandung nilai gizi yang baik, dengan 16-22% mengandung protein dari bagian yang dapat dimakan menurut Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (2007). Disebabkan memiliki kadar

air yang tinggi, yaitu antara 70-80%, ikan digolongkan sebagai bahan pangan yang mudah rusak karena menjadi media pertumbuhan yang mendukung tumbuh kembangnya mikroorganisme pembusuk yang akan menurunkan mutunya.

Ikan yang telah mengalami proses pembusukan, maka mutunya terus menurun dan tidak akan mungkin dikembalikan sesuai mutu terbaiknya yaitu sesaat setelah ikan mati. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya untuk memperlambat proses penurunan mutu ikan sejak proses penangkapan dan kematian ikan. Upaya untuk mempertahankan kualitas ikan sangat bergantung pada cara penanganannya. Secara ideal, ikan harus ditangani dengan cara-cara yang dikenal sebagai cara penanganan ikan yang baik. Prinsip penanganan ikan yang baik tidak lepas dari kondisi dingin, cepat, hati-hati, dan bersih. Semakin awal dan semakin dipenuhi keempat prinsip tersebut akan semakin baik mutu ikan dipertahankan.

Penurunan mutu ikan dimulai sejak ikan ditangkap dan dinaikkan ke atas kapal. Perjalanan penurunan mutu ikan terjadi selama proses penangkapan, penanganan di atas kapal, penyimpanan di dalam palka, pembongkaran, hingga perjalanan muatan ke unit pengolah/konsumen (Alimina et al., 2022). Namun masih kerap dijumpai bahwa penanganan ikan sejak di atas kapal hingga pendaratan masih belum memenuhi prinsip penanganan ikan yang baik. Contoh peristiwa yang masih sering terjadi adalah kurang memperhatikan prinsip dingin dan kehati-hatian dalam penanganan ikan.

Pemerintah sudah melakukan upaya terkait penjaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Peraturan tersebut mengatur dengan detail penerapan sistem yang dapat menjamin mutu hasil perikanan dan sekaligus menjamin keamanan konsumsinya yang wajib dilaksanakan oleh semua pelaku usaha perikanan (Andrimida et al., 2022). Namun demikian, kenyataan yang terjadi di kapal penangkap ikan dan tempat pendaratan ikan masih perlu untuk diperhatikan penerapan cara penanganan ikannya.

Dalam prinsipnya konsep pemerintahan yang baik atau Good Governance tidak akan pernah lepas dengan 3 sektor utama yaitu antara lain state (Negara atau Pemerintah), Society (masyarakat) and Private Sektor (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. (sedarmayanti, 2012). Dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dijalankan, tak jarang pemerintah sering kali berjalan secara berdampingan dengan cara berkolaborasi atau bekerjasama dengan kelompok kepentingan lain untuk mencapai target pelaksanaan program pemerintahan yang ingin dicapai. Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat misalnya, merupakan salah satu wujud kerjasama atas kepedulian pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan kreatif.



Gambar 1.2 Aktivitas Pemilik Kapal dalam Pengumpulan Ikan

Kehidupan nelayan di Sungai Kakap, terutama para pemilik kapal, memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas penangkapan ikan, para nelayan tidak hanya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sungai Kakap, dengan aksesnya ke perairan kaya sumber daya ikan, menjadi pusat mata pencaharian yang tak tergantikan bagi banyak keluarga. Para pemilik kapal sering kali menjadi penggerak utama dalam mengorganisir kegiatan nelayan, mulai dari penyediaan kapal dan peralatan, pengelolaan logistik, hingga pemasaran hasil tangkapan.

Tabel 1.1
yang memuat data target ekspor udang di Kalimantan Barat untuk tahun 2024, berdasarkan informasi dari Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

| Wilayah | Target Volume Ekspor (ton/tahun) | Target Nilai Ekspor (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kecamatan Sungai Kakap | 9.000 | Rp720 miliar | Melalui program Klaster Daya Saing (KDS) oleh Ditjen PDSPKP KKP2 |
| Kalimantan Barat (estimasi total)* | ~9.000+ | Rp720 miliar+ | Data spesifik untuk wilayah lain belum tersedia; fokus utama di Sambas |

Data ekspor udang untuk wilayah Kalimantan Barat 2024

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, target ekspor udang dari Sungai Kakap pada tahun 2024 mencapai 9.000 ton dengan estimasi nilai Rp720 miliar. Angka ini mencerminkan ambisi tinggi untuk mendorong Kalimantan Barat sebagai pusat produksi dan ekspor udang nasional. Namun, untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan sinergi kuat antar aktor dalam rantai pasok—mulai dari nelayan, pembudidaya, pengolah, eksportir, hingga pemerintah daerah dan pusat. Melalui perspektif collaborative governance, ada beberapa tantangan dan potensi yang dapat dianalisis pada, Kondisi Awal: Masih terdapat ketimpangan akses informasi dan pasar antara nelayan skala kecil dengan eksportir besar. Banyak pelaku lokal belum memiliki sertifikasi ekspor atau pemahaman standar kualitas internasional. Kemudian, Desain Institusiona belum semua daerah memiliki forum koordinasi formal yang mempertemukan semua pemangku kepentingan. Kolaborasi sering terjadi secara sporadis dan tidak

terdokumentasi secara sistematis. Kepemimpinan Fasilitatif merupakan Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator kolaborasi sangat krusial, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan keberpihakan terhadap pelaku lokal yang lemah posisinya dalam rantai nilai. Dan pada Dialog Tatap Muka Forum semacam musyawarah desa atau pertemuan antara pembudidaya dan eksportir perlu dijadikan rutinitas sebagai sarana membangun kepercayaan dan saling memahami standar ekspor. Proses Kolaboratif: Komitmen jangka panjang dapat dibangun melalui perjanjian kerja sama berbasis win-win, seperti kontrak harga minimum, program pelatihan berkelanjutan, dan pembagian risiko produksi.

Tabel 1.2 **target ekspor udang yang diharapkan** untuk Kalimantan Barat tahun 2024

| **Wilayah** | **Target Volume Ekspor (ton/tahun)** | **Target Nilai Ekspor (Rp)** | **Program Pendukung** |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Sambas | 9.000 | Rp720 miliar | Klaster Daya Saing (KDS) oleh Ditjen PDSPKP KKP2 |

Berdasarkan program Klaster Daya Saing (KDS) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pemerintah menargetkan Kabupaten Sambas sebagai pusat ekspor udang di Kalimantan Barat, dengan volume ekspor sebesar 9.000 ton dan nilai ekonomi yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp720 miliar pada tahun 2024. Target tersebut tidak hanya mencerminkan potensi produksi udang di wilayah pesisir, tetapi juga memperlihatkan strategi nasional dalam menggerakkan sektor kelautan melalui pendekatan hilirisasi dan orientasi ekspor. Melalui pendekatan

*collaborative governance*, pencapaian target ini memerlukan kerja sama lintas sektor yang solid, melibatkan pembudidaya lokal, eksportir, koperasi nelayan, pemerintah daerah, hingga lembaga sertifikasi mutu dan logistik. Dalam konteks ini, target ekspor tidak sekadar angka, tetapi juga mencerminkan urgensi reformasi tata kelola perikanan berbasis kolaborasi—dimana setiap aktor berperan dalam menciptakan sistem rantai nilai yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika kolaborasi antar aktor sangat penting dalam menilai sejauh mana target tersebut realistis dicapai secara partisipatif dan berkeadilan.

Pendapatan dari aktivitas penangkapan ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan anak-anak, kesehatan, dan pemeliharaan kehidupan keluarga nelayan. Selain itu, pekerjaan ini juga memberikan kontribusi besar terhadap sektor perikanan lokal, termasuk pasokan bahan baku bagi unit pengolahan ikan (UPI) seperti PT. Pulau Mas Khatulistiwa Namun, pentingnya kehidupan nelayan tidak hanya terletak pada aspek ekonominya, tetapi juga pada nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Aktivitas ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam, di mana keberlanjutan sumber daya laut menjadi aspek yang harus dijaga demi masa depan.

Meski demikian, nelayan sering kali menghadapi tantangan, seperti fluktuasi cuaca, penurunan hasil tangkapan, dan keterbatasan fasilitas yang sesuai standar. Di sinilah pentingnya sertifikasi *Good Handling Practices* dan kolaborasi dengan sektor pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas dan nilai hasil tangkapan. Melalui kerja sama yang baik, kehidupan nelayan di Sungai Kakap dapat lebih sejahtera, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih

besar, tidak hanya untuk mereka sendiri tetapi juga untuk komunitas sekitar.

Kehadiran Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Pulau Mas Kahtulistiwa memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Kecamatan Sungai Kakap. Sebagai mitra strategis, UPI ini tidak hanya membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat lainnya. Dengan mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk bernilai tambah, PT. Pulau Mas Khatulistiwa menciptakan peluang bagi nelayan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan jika mereka hanya menjual ikan dalam bentuk mentah. Akses
pasar yang disediakan oleh PT. Pulau Mas Khatulistiwa, baik di tingkat lokal maupun internasional, memungkinkan nelayan mendapatkan kepastian harga dan kestabilan pendapatan, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.

Namun di desa Sungai Kakap masih terdapat 50% Nelayan yang belum memiliki Good Hndling Certificate ( Sumber Data BPPMHKP 2025). 50% nya nelayan tradisional yang bergabung dalam komoditas Nelayan Tradisional Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memenuhi standar sertifikasi, seperti alat pendingin atau ruang penyimpanan ikan yang higienis. Kapal-kapal kecil biasanya tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai karena biayanya yang tinggi. Selain itu, kurangnya pemahaman nelayan tentang pentingnya penerapan *Good Handling Practices* juga menjadi kendala. Banyak nelayan yang belum mendapatkan pelatihan atau penyuluhan yang cukup terkait

dengan penanganan ikan yang baik, sehingga mereka tidak mengetahui standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Dalam proses pendistribusian ikan sering kali ditemukan proses penanganan ikan yang kurang baik. Hal ini tentu akan menurunkan mutu ikan, karena ikan adalah komoditi yang mudah busuk dan harus mendapatkan penanganan yang baik. Hal ini sudah dijelaskan secara langsung dalam PERMEN KP/NO.10/2021 tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), agar ikan yang didistribusikan sampai ke tangan konsumen masih dalam kualitas yang baik. Kegiatan CPIB sering dianggap biasa dan cenderung diabaikan, akan tetapi memiliki dampak yang buruk terhadap mutu ikan sampai ke tangan konsumen. Ikan yang mengalami penurunan mutu akan mengalami pembusukan, penurunan kualitas daging dan sekaligus penurunan harga. Menurut (Metusalach et al. 2014) ikan yang baru mati setelah penangkapan merupakan puncak kesegaran dan kualitas terbaik ikan dan hanya bisa dipertahankan kualitasnya tidak bisa ditingkatkan, melalui proses penanganan yang baik dan benar.

Berikut adalah persyaratan kelayakan produk ekspor udang dari Indonesia yang harus dipenuhi agar dapat diterima di pasar internasional:

1. **Perizinan Ekspor**
    - Harus memiliki izin ekspor resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    - Perusahaan eksportir wajib terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) jika berlaku.

**2. Standard dan Kualitas Keamanan**

- Produk udang harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)
- Pemeriksaan meliputi:
  - Bebas dari bahan kimia berbahaya (misalnya formalin, antibiotik terlarang)
  - Kadar air dan kesegaran sesuai standar
  - Tidak terkontaminasi mikroba patogen

**3. Pengemasan dan Pelabelan**

- Udang harus dikemas dalam kemasan food grade yang higienis dan tahan suhu rendah.
- Label harus mencantumkan:
  - Nama produk
  - Berat bersih
  - Tanggal produksi dan kedaluwarsa
  - Negara asal
  - Nomor registrasi unit pengolahan

**4. Dokumen dan Sertifikasi**

- Sertifikat Kesehatan Ikan (SKI) dari BPPMHKP
- Sertifikat Asal Barang (Certificate of Origin)
- Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk unit pengolahan

5. **Dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list, dan bill of ladingRantai Dingin (Cold Chain)**
    - Udang harus dijaga dalam suhu beku (-18°C atau lebih rendah) selama proses penyimpanan dan pengiriman.
    - Pengangkutan menggunakan kontainer berpendingin (reefer container) yang sesuai standar ekspor.

Persyaratan ini bisa sedikit berbeda tergantung negara tujuan ekspor, karena beberapa negara seperti Jepang, Uni Eropa, atau Amerika Serikat memiliki regulasi tambahan.

PT. Pulau Mas Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat, tergolong sebagai eksportir besar karena beberapa faktor utama. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang signifikan, terutama dalam pengolahan dan ekspor udang beku, yang menjadi salah satu produk unggulan mereka. Mereka berhasil menembus pasar internasional , termasuk Jepang dan Singapura, dengan volume ekspor yang besar. Misalnya , dalam satu bulan, perusahaan ini mampu mengirim hingga lima kontainer -udang beku ke Jepang, dengan nilai ekspor mencapai sekitar Rp. 1 miliar per kontainer.

Selain itu, PT. Pulau Mas Khatulistiwa juga didukung oleh infrastruktur yang memadai dan memenuhi standar internasional , seperti sertifikasi mutu produk. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar global dan memenuhi permintaan dari berbagai negara. Dukungan dari pemerintah daerah, seperti kemudahan dalam proses ekspor, juga ikut memperkuat posisi mereka sebagai eksportir besar. Faktor-faktor ini menjadikan PT. Pulau Mas

Khatulistiwa sebagai salah satu pemain utama dalam sektor ekspor perikanan di Kalimantan Barat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka Identifikasi Masalahnya yaitu, Sebagai berikut :

1. Kelembagaan yang Kurang Efisien dalam Mendukung Kolaborasi Penerapan Good Handling Certificate (CPIB).
2. Kompleksitas Regulasi Penangkapan Produk Perikanan yang tidak jelas
3. Ketergantungan pada Eksporti Besar dalam proses *Collabortive Governance*

   Produk Perikanan
4. Tidak adanya Dokumen Perjanjian antara Kapal Tangkap dan UPI.

## 1.3 Fokus Penelitian

Dilihat dari Latar Belakang Penelitian dan Identifikasi Masalah yang ada, Peneliti Memfokuskan Penelitian pada Pola Hubungan antara Stakeholder dan Swaasta Pada Analisis mengenai collaborative Governance yang di lakukan oleh Pemilik Kapal Tangkap Ikan di Kecamatan Sungai Kakap dengan PT. Pulau Mas Khatulistiwa beserta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kota Pontianak (BPPMHKP) dalam Proses Ekspor Produk Perikanan Udang Beku di Kecamatan Sungai Kakap ke Negara Jepang sebanyak 28 Ton dalam

Penerapan SJMKHP (Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Tahun 2024.

## 1.4 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalahnya yaitu Bagaimana Proses collaborative Governance dalam Ekspor Produk Udang di Kecamatan Sungai Kakap?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, Maka Tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian ini adalah untuk Mengembangkan yaitu,

1. Menganalisis Pola Hubungan Collaborative Governance Antara Nelayan Udang, PT.Pulaumas Khatulistiwa, dan BPPMHKP Pontianak.
2. Menemukan Role Model pada proses Collaborative Governance kegiatan Ekspor Udang di Kalimantan Barat Tahun 2024.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Teori Collaborative Governance: Thesis ini akan menambah literatur dan memperkaya pengetahuan dalam bidang collaborative governance, khususnya dalam konteks Ekspor Hasil Perikanan dalam Bentuk Udang Beku.
2. Pengembangan Konsep Baru Teori Collaborative Governance Kegiatan Eskpor Produk Perikanan Udang .

3. Menganalisis pola konsep Model Collaborative Governance pada kegiatan Ekspor Porduk Udang di Kalimantan Barat.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Kualitas Penanganan Ikan: Membantu para nelayan dan pengelola kapal penangkap ikan di Kecamatan Sungai Kakap untuk menerapkan standar penanganan ikan yang lebih baik, sehingga kualitas ikan yang dihasilkan lebih tinggi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya peningkatan trust building produk perikanan udang di kalimantan barat.
3. Efisiensi Operasional: Mendorong efisiensi operasional dengan memastikan bahwa seluruh proses penanganan ikan mengikuti standar yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan hasil tangkapan.
4. Peningkatan Kepercayaan Konsumen: Dengan menerapkan good handling practices, kepercayaan konsumen terhadap produk ikan dari Kecamatan Sungai Kakap dapat meningkat, yang pada akhirnya agar proses Collaborative lebih Efektiv.
5. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan edukasi kepada nelayan dan pengelola kapal mengenai pentingnya penerapan good handling practices dan Collaborative Governance dalam kegiatan penangkapan ikan.